

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945. Fungsi hukum dalam pembangunan selain sebagai tatanan kaidah dan sarana untuk menyalurkan arah masyarakat kepada tujuan yang dikehendaki oleh adanya pembaharuan yang terencana. Selain itu hukum juga berfungsi sebagai sarana yang memaksa menjerat siapa saja dan sebagai pelindung terhadap warga masyarakat dari ancaman atau perbuatan yang akan membahayakan terhadap diri setiap orang. Di lain pihak hukum sebagai sarana pengendali sosial serta sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka warga binaan pemasyarakatan juga merupakan Warga Negara Indonesia, walaupun pada saat itu mereka statusnya warga binaan pemasyarakatan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan sekarang ini menempatkan tahanan dan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan bimbingan, diharapkan apabila mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara, juga akan hidup secara wajar dalam masyarakat, karena dalam sistem

pemasyarakatan titik beratnya adalah pembinaan supaya dapat hidup bermasyarakat secara wajar dan bebas.

Pemasyarakatan adalah merupakan usaha pemerintah dalam rangka membina orang-orang yang melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi hukuman masuk penjara, dengan maksud mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak 40 tahun yang lalu dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas pengayoman yang dapat dilihat pada penjelasan pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 (Biro Hukum dan Perundang-undangan, 1995: 21) tentang pemasyarakatan sebagai berikut: “Yang dimaksud pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat”. Persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pemahaman ini didukung dalam penjelasan pasal 5 huruf b Undang-undang No. 12 Tahun 1995 sebagai berikut: “Yang

dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang”. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani pidananya.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberi arah, bahwa sistem pemasyarakatan diarahkan pada pembinaan bimbingan dan perawatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam upaya mencapai misi dan visi tersebut diperlukan langkah-langkah keamanan dan ketertiban sehingga program dan sasaran dapat tercapai secara maksimal. Keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan merupakan pondasi sekaligus alat ukur untuk berhasilnya tugas Lapas dan Rutan. Parameter yang dapat dijadikan ukuran aman atau tertibnya suatu Lapas dan Rutan meliputi tingkat pelarian narapidana atau tahanan, perkelahian, unjuk rasa, pemberontakan, perjudian, perdagangan dan penyelundupan barang-barang terlarang (senjata, narkoba, dan obat terlarang lainnya). Oleh karena itu Lapas dan Rutan berupaya secara maksimal untuk dapat memantau, mencegah dan menangkal gangguan Kamtib. Sikap dan perilaku petugas yang baik dapat mencegah situasi kehidupan penghuni tidak mencoba meminimalisir tingkat pelarian narapidana/tahanan. Dapat memelihara keharmonisan kehidupan dalam Lapas dan Rutan. Menjaga dan memelihara seluruh intervensi sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan sistem

administrasi Kamtib yang baik merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab petugas teknis pengamanan. Untuk menghadapi kondisi yang demikian, Direktur Jendral Pemasyarakatan dalam hal ini Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban tengah berupaya mengambil langkah strategis untuk mengembalikan tugas pokok dan fungsi petugas pengamanan Lapas dan Rutan terutama dalam hal pembinaan dan pengamanan agar sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Rencana strategi (Renstra) dibidang keamanan dan ketertiban dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas Kamtib Lapas dan Rutan yang mantap. Lapas/Rutan menjadi faktor dominan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, sebaliknya dengan pembinaan yang baik dan terarah akan menciptakan stabilitas Kamtib/Rutan yang mantap. Dua pilar dimaksud menjadi ujung tombak yang setara dalam rangkaian proses sistem pemasyarakatan dibidang Kamtib.

Filosofi yang menjadi dasar dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah pembinaan kepada narapidana yang dilandasi dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Seperti diuraikan dibawah ini:

1. Orang yang tersesat harus diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan;

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat pengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan dan kepentingan negara sewaktu saja;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang ada di tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan telah ditetapkan rumusan sasaran yang hendak dicapai berupa sasaran umum dan khusus. Sasaran umum pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari kapasitas;
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelanggaran dan gangguan keamanan serta ketertiban;
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui asimilasi dan integrasi;
4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;

5. Semakin banyaknya jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan warga binaan pemasyarakatan;
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30;
7. Prosentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat;
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
9. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara;
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sebaliknya nilai-nilai sub kultur penjara di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain sasaran umum tersebut di atas, maka terdapat rumusan sasaran yang merupakan sasaran khusus ditujukan kepada individu warga binaan pemasyarakatan, meliputi masalah-masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatnya kualitas intelektual;
3. Meningkatnya kualitas sikap dan perilaku, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara;
4. Meningkatnya kualitas profesionalisme/ketrampilan;
5. Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani;

Keberhasilan dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tergantung dari partisipasi terpadu dari pembina, yang dibina dan masyarakat, sehingga kinerja dari para pembina yang disebut sebagai petugas pemasyarakatan sangat diharapkan untuk dapat mempengaruhi hasil akhir dari tujuan pemasyarakatan.

Sasaran yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta. Rutan klas I Surakarta merupakan bagian dari Departemen Kehakiman dan HAM yang sangat menerapkan disiplin tinggi dalam bekerja. Sebagai Rumah Tahanan seharusnya hanya menerima tahanan saja, tetapi karena di Surakarta belum ada Lembaga Pemasyarakatan maka Rutan klas I Surakarta juga menerima tahanan dan narapidana. Beban tugas yang besar itulah penerapan disiplin dan motivasi yang tinggi dalam bekerja sangat diperlukan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.

Secara umum situasi dan kondisi di Rumah Tahanan Klas I Surakarta tidak kondusif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi beban tugasnya karena kurangnya dukungan fasilitas serta sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga kurang optimalnya dalam menjalankan tugas. Maka dari itu perlu diadakan penilaian tentang kinerjanya. Indikasi dari penilaian ini adalah dengan adanya penurunan secara drastis pencapaian sasaran tugas yang telah ditetapkan, misalnya (a) kurang memahami sepenuhnya apa yang harus dikerjakan apakah sesuai dengan perundangan-undangan dan peraturan yang menjadi landasan operasional dan konseptual sistem pemasyarakatan; (b) perilaku indisipliner seperti tidak masuk kantor dengan alasan sakit, masuk kantor

terlambat, meninggalkan kantor dalam jam kerja, menunda penyelesaian pekerjaan, berpakaian dinas tidak sesuai dengan aturan dan lain-lain; (c) melaksanakan tugas-tugas setelah ada perintah, sehingga ada kesan kalau petugas berprakarsa terhadap pekerjaan akan takut salah atau merasa membuang waktu.

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan tersebut maka penulis berniat untuk mengungkap secara ilmiah mengenai **“PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA PETUGAS PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I SURAKARTA”**. Dengan harapan bahwa langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat dijadikan acuan untuk diberlakukan secara umum di lembaga pemasyarakatan lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang masalah penulis mengambil dan mengangkat permasalahan yaitu “Apakah motivasi dan disiplin berpengaruh terhadap kinerja petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:



1. Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta:

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan pertimbangan bagi unsur pimpinan untuk lebih memahami dan menghayati arti pentingnya penilaian kinerja yang akan menunjang tugas-tugas sebagai perangkat institusi pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana;
- b. Dapat dijadikan sebagai model yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk diterapkan sebagai langkah evaluasi dan penyempurnaan perilaku petugas agar tercapai kinerja yang diharapkan.
- c. Kontribusi pemikiran bagi level pimpinan pada Rumah Tahanan Klas I Surakarta tentang pentingnya hubungan motivasi dan disiplin terhadap kinerja petugas.

2. Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan akan memberikan manfaat dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya manajemen sumber daya manusia terutama dalam teori-teori kinerja.

**D. Sistematika Penulisan Tesis**

Laporan penelitian ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

## Bab II : Landasan Teori

Menguraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini meliputi: pengertian motivasi, teori motivasi, disiplin, kinerja karyawan, penilaian kinerja, hasil penelitian terdahulu, dan hipotesis.

## Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel, definisi variabel, variabel motivasi, variabel disiplin, variabel kinerja, teknik pengumpulan data, analisis data, analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif

## Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Memaparkan hasil penelitian berupa gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, gambaran umum responden, pengujian instrumen validitas dan reliabilitas, analisis data yang meliputi analisis regresi, uji ketepatan parameter estimate, uji ketepatan model, uji asumsi klasik serta pembahasan dari hasil penelitian.

## Bab V : Penutup

Pada bab ini menyajikan hasil kesimpulan dari penelitian, memaparkan keterbatasan masalah, dan memberikan rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait.